



Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements for strengthening land tenure, forest and community rights in Indonesia (CoLUPSIA)



LAPORAN WORKSHOP

Putussibau, 28-29 September 2010



**Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	2
2. PELAKSANAAN WORKSHOP.....	4
2.1. Workshop Hari Pertama, 28 September 2010.....	4
2.1.1 Sambutan Pembukaan Workshop	4
2.1.2 Panel 1. Peran pemerintah daerah dalam mendorong proses perencanaan tata guna lahan	5
2.1.3 Panel 2. Perkenalan proyek CoLUPSIA	7
2.1.4 Panel 3. Aspek Hukum Perencanaan Tata Guna Lahan	10
2.1.5 Panel 4. Penyadartahuan publik yang mendukung perbaikan dalam pengambilan keputusan terkait rencana tata guna lahan.....	12
2.2. Kesimpulan Diskusi Panel	14
2.3. Workshop Hari Kedua, 29 September 2010	15
2.3.1. Identifikasi dan Analisis Stakeholder	15
2.3.2. Diskusi Kelompok Identifikasi dan Analisis Stakeholder	16
2.3.3. Hasil Diskusi Kelompok	17
3. KESIMPULAN DAN PENUTUP	20

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan seringkali dipersepsikan berada pada sisi yang berlawanan dengan upaya kegiatan konservasi. Pembangunan berkelanjutan menawarkan pemahaman yang mendudukkan pembangunan tidak semata-mata berorientasi kepada kepentingan ekonomi, tetapi secara bersama-sama memberi nilai tambah bagi aspek ekologi dan sosial. Konsep ini mengintegrasikan pembangunan yang memenuhi keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial (profit, planet and people).

Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Kalimantan. Dengan luas area mencakup 20 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten Kapuas Hulu merupakan benteng terakhir kekayaan sumber hayati yang memberikan nilai ekonomi, ekologi serta sosial. Dengan luas kawasan hutan yang mencapai hampir 70 persen tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya kontribusi ekologis terhadap kabupaten-kabupaten di wilayah hilir demikian besar.

Saat ini terdapat beberapa tantangan perencanaan tata guna lahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pengelolaan hutan dimasa lalu telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan sehingga dukungan fungsi ekologis dari hutan ikut menurun. Kedua, kondisi lahan yang dapat difungsikan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, maupun kehutanan luasnya relatif tetap namun kebutuhan terhadap lahan justru semakin meningkat. Hal ini apabila tidak dipecahkan dapat menyebabkan munculnya potensi konflik terkait penggunaan lahan.

Dalam menghadapi berbagai pilihan penggunaan lahan atau sumber daya alam, tahap perencanaan merupakan tahapan yang krusial dalam rangka mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Perencanaan tersebut hendaknya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kalangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, kelompok perempuan maupun LSM merupakan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Sehingga, perencanaan tersebut memasukkan berbagai pertimbangan baik biofisik, ekonomi, sosial maupun hak-hak tradisional masyarakat.

Berangkat dari pemahaman terhadap kondisi tersebut maka CoLUPSIA berinisiatif mengadakan perkenalan program sekaligus diskusi Panel untuk menggali gagasan-gagasan yang berkaitan dengan perencanaan tata guna lahan kolaboratif.

Proyek CoLUPSIA merupakan kerjasama antara CIRAD France (Agriculture Research and Development), CIFOR (Center for International Forestry Research), TELAPAK, HuMa dan Riak Bumi dengan dukungan dari Uni Eropa meliputi tiga lokasi yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Boyolali yang akan berlangsung selama 4 tahun (2010-2014). Di Kabupaten Kapuas Hulu, Proyek

CoLUPSIA akan bekerja sama dengan BAPPEDA sebagai instansi perencana pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Proyek ini secara umum bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan kerusakan lingkungan dengan mengembangkan kelembagaan yang berkelanjutan serta mendorong perbaikan kebijakan dan instrument berkaitan dengan lahan yang sesuai untuk masyarakat lokal. Melalui perencanaan tata guna lahan kolaboratif diharapkan akan mendukung kelembagaan, kebijakan serta instrument pembiayaan pro-poor yang berbasis kepastian lahan dan hak-hak masyarakat.

Kegiatan yang akan dilakukan antara lain (1) penguatan kelembagaan terkait land use planning, (2) review dan analisis pengelolaan sumber daya alam, (3) membangun kesepakatan land use plan yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan, (4) pengembangan lokasi pilot untuk menunjukkan mekanisme pembiayaan pro-poor berbasis konservasi, dan (5) penyadaran public mengenai pentingnya tata guna lahan kolaboratif.

Tujuan Workshop

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Perkenalan dan penyampaian informasi mengenai kegiatan Proyek Co-LUP di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Menemukenali perubahan-perubahan yang sudah, sedang dan mungkin akan terjadi terhadap penatagunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Mendorong munculnya gagasan berkaitan dengan tata guna lahan yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak di Kabupaten Kapuas Hulu

Hasil yang diharapkan

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terbangunnya komunikasi antar pihak sebagai langkah awal dalam upaya membangun gagasan mengenai tata guna lahan kolaboratif di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Terbangunnya dialog antar pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu yang mengedepankan pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas
3. Tersampainya informasi mengenai kegiatan Proyek CoLUPSIA di Kabupaten Kapuas Hulu
4. Teridentifikasi peluang dan tantangan dalam mewujudkan kolaborasi perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu

2. PELAKSANAAN WORKSHOP

2.1. Workshop Hari Pertama, 28 September 2010

2.1.1 Sambutan Pembukaan Workshop

oleh Bapak Agus Mulyana, SH. (Wakil Bupati Kapuas Hulu)

Acara pembukaan diskusi Panel Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements (CoLUPSIA) ini dibuka oleh Bapak Agus Mulyana SH, selaku wakil Bupati Kapuas Hulu. Dalam sambutannya, beliau atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik inisiatif yang akan dilakukan oleh Proyek Uni Eropa untuk melaksanakan kegiatan CoLUSIA project di Kabupaten Kapuas Hulu. Dijelaskan pula, kabupaten Kapuas Hulu yang dikenal sebagai Kabupaten Konservasi memiliki potensi alam yang luar biasa. Letak geografis Kabupaten Kapuas hulu yang berada di bagian hulu sungai Kapuas merupakan penyokong ekosistem bagi kabupaten lain di bagian hilir.

Dari sisi penggunaan lahan, penggunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sistem pertanian masyarakat yang masih menggunakan sistem ladang berpindah dan masih mendayagunakan teknologi pertanian yang tradisional. Selain itu terdapat permasalahan berkurangnya daya dukung lahan ditengah meningkatnya kebutuhan akan lahan baik dari sector pertanian maupun non pertanian. Kebutuhan inilah yang seharusnya dikelola dalam satu perencanaan tata guna lahan yang komprehensif dengan mempertimbangkan luasan wilayah yang relatif tetap sedangkan jumlah penduduk maupun kebutuhan akan lahan hampir dipastikan selalu meningkat.

Gambar 1 Suasana Pembukaan Diskusi Panel oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu



Beliau berharap agar diskusi panel ini dapat menghasilkan gagasan yang bermanfaat terutama dalam hal tata guna lahan. Jumlah lahan yang bisa dibudidayakan hanya sekitar 49% sehingga apabila tidak dikelola akan menimbulkan permasalahan. Sector swasta diharapkan untuk dpt melakukan kegiatan (kebun, tanaman, dll) sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, dan juga memperhatikan hak masyarakat di wilayah operasinya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menilai kegiatan ini penting bagi pemerintah daerah mengingat persoalan tata guna lahan atau land use planning merupakan permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah daerah menyadari apabila kegiatan seperti ini disinergikan dengan program SKPD akan memberikan nilai tambah dan manfaat melalui pertukaran pengetahuan sekaligus adanya pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

Beliau menutup sambutannya dengan menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah menyambut baik semua inisiatif yang dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, mendorong pembangunan dan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan para pihak yang ada di kabupaten Kapuas Hulu termasuk sector swasta, masyarakat dan pemerintahan daerah.

2.1.2 Panel 1. Peran pemerintah daerah dalam mendorong proses perencanaan TGL oleh Syarif Uswardan, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

Bapak Syarif Uswardan memaparkan keterkaitan isu global, regional dan lokal terkait dengan perubahan iklim dan cara pandang para stakeholder khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam paparannya, ditataran global perubahan iklim telah mengakibatkan perubahan perilaku manusia termasuk cara pandang, cara hidup dan bagaimana manusia memperlakukan alam. Dalam skala yang lebih kecil, Kabupaten Kapuas Hulu dianggap penting karena merupakan paru-paru dunia yang vital bagi ekosistem Kalimantan (heart of Borneo). Selain itu, Kapuas Hulu memiliki ekosistem khas dan unik yang didukung oleh Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Kondisi ini menarik bagi banyak kalangan diantaranya terdapat 17 NGO yang melakukan kegiatan maupun kajian dan penelitian di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Gambar 2. Presentasi Bappeda Kapuas Hulu



Kabupaten Kapuas Hulu telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi melalui SK Bupati No. 144/2003. Sebagai kabupaten konservasi, sampai sekarang belum mendapat kompensasi apapun. Menurut Bapak Syarif Uswardan, hal ini disebabkan masih adanya tarik ulur kepentingan negara pendonor terhadap dana kompensasi karbon, belum jelasnya mekanisme perdagangan karbon dan pengelolaan pemanfaatan kawasan oleh pemerintah yang belum memenuhi standard konservasi (illegal logging).

Namun demikian, pemerintah daerah tetap konsisten dan mengoptimalkan implementasi konsep kabupaten konservasi dalam revisi tata ruang wilayah (RTRWK) tahun 2010. Ini terlihat dari usulan pemda terhadap pola ruang kawasan hutan yang masih mendominasi sebesar 71% dari luas wilayah kabupaten sebesar 3,1 juta ha.

Dari sisi perencanaan, terdapat dua hal yang menjadi perhatian yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan. Perencanaan pembangunan dikritik terlalu

menekankan pada isu fisik keruangan yang meliputi perubahan tata guna lahan tapi kurang mawadahi dinamika perubahan sosial masyarakat. Selain itu ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan tidak dimasukkan sebagai pertimbangan. Ditambah lagi dengan kurangnya instrumen untuk implementasi.

Kedua, perencanaan spasial suatu wilayah di Indonesia dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah (RTRW) setingkat kabupaten, berbasis pada perencanaan komprehensif rasional (lihat UU No. 24/2005 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional). Bapak Syarif Usmandan menjelaskan mengenai adanya pergeseran perencanaan strategis keruangan yang disebabkan oleh reposisi peran perencana keruangan dari *providing* (memberikan arahan) menjadi *enabling* (menjadi peluang terjadinya investasi dan pembangunan). Pembuatan rencana strategis keruangan berada di tingkat local atau masyarakat bukan di nasional maupun regional. Adanya proses pembelajaran dengan meningkatkan modal masyarakat (sosial, intelektual dan politik). Dan terjadi pergeseran peran utama dalam penyusunan rencana dari pemerintah sebagai peran utama menjadi ke kolaboratif aktif antar unsur stakeholder di masyarakat.

Sehubungan dengan partisipasi, pemerintah dan NGO harus melakukan sinergi. Beliau menjelaskan pemerintah memiliki keunggulan dalam pembuatan kebijakan serta peran sebagai otoritas di daerah. Kelemahannya, kurangnya SDM dan alokasi pembiayaan pembangunan daerah yang kurang proporsional. Sementara NGO memiliki keunggulan SDM yang berkualitas dan dukungan dana yang mencukupi, namun adanya hambatan operasional yang tinggi sehingga efektifitas penelitian dan kajian rendah.

Oleh karena itu beliau memberikan tawaran yang diusulkan sebagai arena NGO berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pertama, area social capital dimana NGO berperan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, ekonomi masyarakat, diantaranya oleh CIFOR (CIRAD), WWF (PWS, Kompakh), FFI (REDD), GTZ (REDD), Skala (pemetaan participative), APDS (madu organic), Riak BUmi (pemberdayaan masyarakat), Pancur kasih (CU), Kaban (pemberdayaan masyarakat), Lanting Borneo (pemberdayaan masyarakat), PPSDAk, PPSAK. Kedua, area *good governance* dalam bentuk meningkatkan kapasitas aparatur, sarana prasarana dan sistem informasi, diantaranya oleh DED, Sekala, FFI, GTZ, WWF, LBBT. Ketiga, ranah ecology dimana NGO berpartisipasi dalam mendorong konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem diantaranya CIFOR, WWF, FFI.

Partisipasi tersebut dapat dikombinasikan dengan mekanisme perencanaan *bottop-up* yang dimulai dari musrenbang desa hingga kabupaten. Pemerintah daerah, menurut Bapak Syarif Usmandan, mengharapkan partisipasi NGO membantu mewujudkan kabupaten kapuas hulu sebagai kabupaten konservasi yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sesi Tanya Jawab Panel 1

Tanya: Bapak Idrus (BAPPEDA Kapuas Hulu)

Bagaimana melakukan kegiatan partisipasi untuk suatu kecamatan yang sangat besar kalau waktunya tidak cukup? Masih banyak masyarakat miskin di daerah konservasi, ini artinya program dan kegiatan selama ini belum bisa memberikan dampak yang berantai untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal disatu sisi, kita selalu minta masyarakat untuk melakukan program konservasi hutan di TNDS dan TNBK. Kalau program ini masuk ke taman nasional, sasaran utama adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, kalau tidak sebegus apapun program yang dibuat tidak akan memberikan hasil.

Tanya : Bapak Baco Meiwa (Fraksi Bintang keadilan, DPRD Kapuas Hulu)

Kabupate konservasi gagal menyejahterakan masyarakat di kabupaten Kapuas Hulu. Kesannya kabupaten ini hanya dijual untuk sekelompok orang saja. Saya saran untuk dilepaskan saja, agar tidak menjadi bulan-bulanan kepentingan NGO dan pihak-pihak lain. Saya masih percaya niat baik dari NGO local dan internatioanal, hanya perlu keterbukaan. Kebijakan yang berjalan sekarang ini adalah untuk tujuan politik semata. Data sharing dari NGO sangat diharapkan, karena yakin PEMDA tidak punya data lengkap. Dari kegiatan ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa di bawa ke level atas pengambil keputusan. Dan yang penting, bagaimana merubah *mindset* masyarakat untuk melakukan perbaikan.

Tanya : Ibu Claudia Ani (Bagian Ekonomi SEKDA)

Perencanaan tata guna lahan yang disusun sekarang ini, bagaimana membuat suatu mekanisme yang outputnya adalah produk hukum, sehingga tidak bisa diintervensi lagi secara politis. Teman-teman di NGO supaya memberikan masukan, terutama bagaimana menyusun tata guna lahan secara kolaboratif. Saya tidak sependapat dengan presenter tentang dana minimal di Kapuas Hulu. Yang benar, kita melihat trennya seperti membagi-bagikan proyek. Jadi masing-masing unit kerja seharusnya memberikan prioritas apa yang dikerjakan, sehingga dapat tercemin dalam APBD.

Jawab : Bapak Syarif Usmardan

Berkaitan dengan produk hukum, sekarang ini sedang dilakukan revisi tata ruang, minimal sudah harus diperdakan tahun 2011 untuk level kabupaten. Ketika sudah diperdakan, akan menjadi sebuah kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, pemerintah, institusi, masyarakat dan stakeholders. Project COLUPSIA ini akan menekankan pada bidang pertanian secara collaborative di kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.3 Panel 2. Perkenalan proyek Collaborative Land Use Planning

oleh Dr. Yves Laumonier

Dalam presentasinya, Bapak Yves menjelaskan tentang latar belakang kegiatan proyek CoLUPSIA yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Mengapa donor tertarik untuk melakukan studi ini di Indonesia? Ini dikarenakan banyaknya fungsi ekologis yang sudah mulai hilang, di satu sisi masih banyak masyarakat banyak masih tergantung pada

hutan. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan suatu aksi lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Gambar 3. Presentasi Proyek CoLUPSIA oleh Dr Yves Laumonier



Dijelaskan bahwa tujuan utama proyek ini adalah untuk mengurangi penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan dengan mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa kita tidak hanya membicarakan masalah konservasi saja tetapi juga bagaimana memberikan suatu solusi, salah satunya melalui mekanisme jasa lingkungan. Dalam proyek ini akan memfasilitasi para stakeholder untuk membangun kesepakatan mengenai tata guna lahan secara kolaboratif. Kegiatan CoLUPSIA ini akan dilakukan di tiga lokasi di Indonesia yaitu Kapuas Hulu, Maluku dan Boyolali. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan beberapa alternatif solusi, dan akan lebih baik daripada hanya memberikan satu solusi saja.

Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, selama ini sudah dikenal karena mempunyai 2 (dua) kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun. Selain itu Kabupaten Kapuas Hulu telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi. Sebagai Kabupaten yang berada di bagian hulu, peranannya dalam penyediaan jasa ekosistem sangatlah penting terutama bagi kawasan-kawasan yang berada di bagian hilir.

Proyek ini menekankan pada lima komponen utama yang akan menjadi focus kegiatan, yaitu mempelajari kondisi awal, mengoleksi data biofisik dan social, analisa data/modelisasi/legal aspek, aktivitas pilot/implementasi/advokasi, dan penyadartahuan CoLUPSIA dan jasa lingkungan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses perencanaan secara kolaborasi, Pak Yves memberikan contoh studi CoLUPSIA di Pulau Yamdena yang dilakukan dari tahun 2003-2006. Studi di Yamdena ini mencakup kegiatan biofisik dan social. Menurut Beliau salah satu kelemahan di dalam pemetaan dan data spatial adalah karena data yang dipakai menggunakan skala 1:250.000 sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan lapangan atau menjadi kurang akurat. Oleh karena itu informasi tentang data spatial yang lebih detail, termasuk data yang lebih detail mengenai tutupan lahan, data ekologi, dan data social harus dikoleksi pada saat melakukan studi.

Selanjutnya untuk studi terkait dengan aspek social ekonomi di dalam konteks CoLUPSIA, Bapak Bayuni Shantiko juga menjelaskan bagaimana pengambilan data informasi tersebut dilakukan dan metode apa yang digunakan. Bapak Bayuni juga menjelaskan bagaimana informasi langsung dari masyarakat ini akan berperan di dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Alur pengkajian desa ini dalam prosesnya akan ditindaklanjuti di dalam suatu lokakarya di tingkat desa, kemudian berlanjut di tingkat

kabupaten, dan juga dilakukan pertemuan antar desa, sehingga pada akhirnya akan bisa dicapai suatu kesepakatan bersama tentang Rencana Tata Guna Lahan yang nantinya bisa di implementasikan dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif.

Sesi Tanya Jawab Panel 2

Tanya Bapak Mufti Muamar (TNBK) :

Terkait mekanisme jasa lingkungan yang mana yang akan dilakukan?

« Kita diharapkan untuk menjaga lingkungan dan disatu pihak masyarakat juga memerlukan SDA. Kegiatan ini bagus sekali, dan diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat »

Bapak Rupinus (Camat Batang Lupar)



Tanya Bapak Lidung (Camat Putussibau Utara) :

Menyampaikan penghargaan untuk NGO yang berinisiatif melakukan perencanaan tata guna lahan di Kapuas Hulu. Tapi yang penting, hasilnya harus ada dan berdampak pada masyarakat. Sertifikasi hutan contohnya di Sui Utik diberikan oleh Menteri Kehutanan, tetapi belum ada hasil yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikannya ke depan.

Tanya Bapak Indra (Dinas Perkebunan dan Kehutanan):

Collaborative LUP merupakan istilah baru tapi polanya sama dengan model partisipatif yang sebelumnya sudah ada. Apakah kegiatan ini mencakup total Kapuas Hulu secara keseluruhan, atau level desa? Atau level kecamatan?.

Pertanyaan kedua, capacity building yang akan dilakukan maksudnya apa? Untuk siapa? Apa untuk NGO project partner saja sehingga ketika project selesai semuanya habis. Mengenai waktunya, project hanya 4 tahun, padahal perda mengenai RTRW baru keluar tahun 2011, ini harus menjadi perhatian. Tentang data, bagaimana bisa sharing ke pemda? Bagaimana hubungan dengan Pemda? Apakah langsung dengan BAPPEDA, atau Dishut? Atau seperti apa ? Ini harus dijaga dan diperhatikan. Sebab rasa memiliki harus ada dari stakeholder di tingkat daerah atau kecamatan. Hasilnya sudah ada tapi tidak ditinggal.

Terakhir, tentang perijinan, apakah semua lahan sudah ada ijinnya? Semua wilayah di Kapuas Hulu sudah mempunyai ijin. Ini yang harus diperhatikan dari legal aspek. Jangan sampai menghilangkan masalah dengan memunculkan masalah baru.

Respon presenter sesi 2

Jawab Dr Yves Laumonier:

Mekanisme finansial untuk jasa lingkungan bisa didiskusikan di forum ini, dicari mekanisme yang sesuai dengan kondisi Kapuas Hulu. Ada beberapa mekanisme yang sudah kita tahu, tapi kita akan lihat semua alternative yang paling cocok untuk daerah ini.

Tentang tata guna lahan dari awalnya akan melibatkan masyarakat di dalam proses. Tahun ketiga akan dicari solusi yang sesuai misalnya kegiatan pertanian atau air untuk pertanian yang sederhana. Perencanaannya dibuat bersama dengan masyarakat, bisa dimulai di tahun ketiga.

Mengenai kawasan konservasi, project akan mencoba membuat rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya. Implementasi akan dilakukan pada tahun ketiga dan keempat. Untuk sertifikasi, kita tidak akan kerjakan, tapi bisa kita kasih contoh. Berkaitan dengan masyarakat perlu hati-hati supaya tidak memberi harapan. Proyek akan berusaha yang terbaik.

Proyek ini cakupannya adalah level kabupaten. Disini ada beberapa study lebih detail dan tidak akan kerja diseluruh desa di kabupaten Kapuas Hulu. Di Kabupaten kita kerja dengan semua pihak, termasuk pemda dan masyarakat. Capacity building, dilakukan dengan identifikasi bersama, pemda dan masyarakat, perlu capacity building apa dan itu yang akan dilakukan oleh project. Mengenai revisi RTRW yang ditetapkan tahun 2011, kita tidak bisa mengikuti prosesnya. Tapi dengan data yang lebih detail mungkin bisa membantu pemda untuk revisi 4-5 tahun kedepan. Mengenai status lahan dan hukum, di bagian proyek ini ada mitra yang akan kerja di aspek legal.

Untuk data akan diberikan kepada semua dan akan dikembangkan bersama dengan Bappeda dan akan dishare dengan instansi lain. Proyek tidak keberatan, juga apabila ada pihak-pihak lain yang datang.

2.1.4 Panel 3. Aspek Hukum Perencanaan Tata Guna Lahan

oleh Bernardinus Steni (HuMA)

Presentasi disampaikan oleh Bapak Steni yang menjelaskan mengenai konteks kebijakan dan praktek di lapangan terkait dengan permasalahan tata guna lahan. Dalam konteks nasional, Steni menjelaskan kebijakan antara tata ruang, sektoral (kehutanan, pertanian, pertambangan, perkebunan, air), lingkungan hidup dan dalam negeri memperlihatkan adanya tumpang tindih dan kurang memperhatikan aspek sosial sehingga terjadi konflik.

Sementara itu pola kebijakan daerah secara umum mengikuti kebijakan pusat, ada pula daerah yang menentukan secara sendiri-sendiri. Steni menekankan hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk membuat usulan kebijakan ke depan. Di lapangan terdapat model tata guna lahan yang berbeda yang mempunyai titik temu dengan konsep konservasi. Lalu bagaimana dengan yang belum ada titik temu? Steni menjelaskan titik temu bisa terjadi dengan pihak yang mempunyai kepentingan sama apakah itu

pemerintah daerah maupun swasta. Juga dapat diketahui ketidaksesuaian tata guna lahan antara para pihak. Oleh karena itu skenario CLUP dalam kebijakan diharapkan muncul dari diskusi bersama stakeholder atau hasil temuan di lapangan. Dengan demikian gap antara kebijakan pusat maupun daerah dengan praktek di lapangan tidak terjadi.

Steni menutup presentasi menjelaskan sasaran aspek legal dari proyek CoLUPSIA adalah

- Tata guna lahan masyarakat bisa menjadi bagian kebijakan perencanaan tata guna lahan skala kabupaten, provinsi hingga nasional
- Berbagai pola tata guna lahan saling mendukung memberikan kontribusi bagi pengelolaan lahan berkelanjutan
- Kebijakan perencanaan pembangunan sinkron dengan perencanaan ruang

Sesi tanya jawab Panel 3

Tanya Rachmad Hafiz (WWF) :

Saat ini terjadi kegamangan aktor dalam skenario community conservation area (CCA). Mengenai ini ditingkat implementasi ada gap antara kementerian kehutanan dengan pemda lokal. Pekerjaan multi pihak menjadi bingung bagaimana kebijakan di terapkan dan apa yang disampaikan oleh anggota dewan bahwa dimenisi politik lebih besar dan mengikuti alur dan di dominasi oleh kepentingan politis

Tanya : Baco Maiwa (DPRD Kapuas Hulu)

Aspek hukum lebih mudah dicerai oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan hak adat belum siap bila tanahnya secara legal dimanfaatkan oleh perusahaan.

Semenjak era reformasi kadang-kadang aspek hukum begitu mudah dicerai oleh masyarakat sendiri dan orang jadi malas karena tidak ada kepastian hukum. Apalagi dimasyarakat ada hak ulayat dan pemerintah mengeluarkan ijin lahan namun masyarakat tidak siap lahan digunakan. Saya minta saran bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Pemerintah berisaha membuat perda dan kadang dikalahkan oleh masyarakat dan kita bingung karena ada kelompok yang maunya A dan ada yang mau B. Kami sering bertemu dengan kondisi seperti ini dan kita pikir untuk kesejahteraan bagi mereka.

Respon presenter Panel 3

Jawab Steni :

1. Secara kelembagaan otoritas yang mempunyai wewenang adalah pemilik mandat dan hampir sudah ada aturan mainnya dan persoalannya. Oleh karena itu perlunya kesepakatan antara pihak yang berwenang dengan hal tersebut. Pada banyak kasus banyak kesepakatan sektoral dilevel bawah.
2. Sinkronisasi dilapangan antara praktek kearifan lokal antara pemerintah dan masyarakat diperlukan. Setelah reformasi muncul berbagai gugatan diluar pengadilan karena sumberdaya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini bahwa contoh empirik bahwa kawasan pertanian terpadu didorong untuk kebijakan pangan dan undang-undang tata ruang dimana hal itu dibentuk di Jakarta tanpa ditanyakan ke masyarakat dan hal ini

sering menimbulkan gap. Melalui proyek CoLUPSIA, akan dicoba alternative terbaik, dengan mengusulkan dari bawah ke atas, juga dengan memperhatikan aturan2 yg sudah berlaku.

2.1.5 Panel 4. Penysadartahuan publik yang mendukung perbaikan dalam pengambilan keputusan terkait rencana tata guna lahan

oleh Bob Purba (Telapak)

Presentasi panel 4 disampaikan oleh Bapak Bob dari TELAPAK. Dalam presentasi tersebut Bapak Bob menjelaskan mengenai peran media dan pelibatan publik dan partisipasi stakeholder dalam isu-isu local. Terkait dengan peran Telapak dalam proyek CoLUPSIA ini, Bapak Bob menjelaskan bahwa media development akan diimplementasikan oleh Gekko Studio yang merupakan infrastruktur Media TELAPAK.

Gambar 4. Presentasi Panel 4 oleh TELAPAK



Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan media development dan penyadartahuan publik adalah Proyek CoLUPSIA bisa dikenal oleh para stakeholder (masyarakat luas dan pemerintah) baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian terbangun kepercayaan dan terjalinnya kerjasama dalam proses implementasi kebijakan.

Bapak Bob memaparkan tahapan strategi yang digunakan meliputi sebagai berikut :

1. Elemen kunci (4P): Problem, Public, Product, Plan
2. Kegiatan kunci: assessment, design & perencanaan, uji coba, implementasi, monitoring dan evaluasi yang sifatnya iteratif atau berulang
3. Lingkup kerja: analisis actor, target penerima informasi, pesan seperti apa?, bagaimana pengemasan terhadap pesan disampaikan?, produk media seperti apa?
4. Memetakan pelaku media: apa yg mereka tahu tentang kegiatan yang akan dan atau sedang dijalankan?, apa yg dibutuhkan mereka, seberapa jauh mereka memiliki hubungan dengan masyarakat lokal maupun tingkat pemerintah, bagaimana hubungan kerja mereka dengan pelaku media yang lain?
5. Saluran yg akan digunakan: menyediakan produk media yang tepat, memfasilitasi trip media, melakukan pertemuan regular untuk pelaku media, memfasilitasi pengembangan sarana media, dan melakukan evaluasi dampak dari produk yg dihasilkan.

Untuk menjalankan strategi tersebut, diperlukan beberapa pra kondisi antara lain masukan dari semua pihak yang terlibat di proyek dan stakeholder lainnya (pemerintah, masyarakat), assesment terkait 'aktor pelaku', yang berada di lokasi kegiatan, strategi

komunikasi yang efektif dalam menjalankan kegiatan dan assesment untuk menilai peluang dan tantangan dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Sesi tanya jawab Panel 4

Tanya Bapak Baco Maiwa (DPRD Kapuas Hulu):

Media menjadi penting di era teknologi informasi ini, sudah adakah film-film documenter untuk wilayah Kapuas Hulu? Kalo ada mungkin bisa sharing. Bila sudah buat film documenter, sebaiknya di share ke masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pemahaman secara utuh tentang visualisasi kondisi lapangan yang sesungguhnya. Apakah sudah ada forum khusus sesama NGO, sehingga bisa lanjut dengan social networking, seperti facebook atau lainnya, sehingga ada kelanjutan komunikasi antar NGO.

Tanya Bapak Jim Sami (Riak Bumi):

Mengusulkan kalau ada peluang untuk membentuk komunitas audio fotografi agar bisa dipertimbangkan.

Tanya Kapten Siswadi (Kodim Kapuas Hulu):

Misi NGO ini sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaan banyak LSM yg sudah ada dan kami yang punya hubungan langsung dengan masyarakat banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, tentang daerah penyangga atau hutan lindung, dan aktivitas mereka dibatasi. Sebelum daerah ini ditentukan sebagai daerah konservasi, mereka sudah ada disini, tapi skarang mereka tidak bisa ambil SDA dengan bebas. Program karet sebenarnya bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, masalahnya, setelah ditanam tidak ada kelanjutan bagaimana pemanenan dan pemasaran. Sehingga masyarakat tidak percaya atau kecewa dengan pihak luar.

Tanya Bapak Samidin (Kodim Kapuas Hulu):

Dalam waktu 4 tahun ini, apa tujuan akhir dari NGO ini. Kira-kira bisa tidak kegiatan NGO ini dipadukan dengan kegiatan Kodim terkait keamanan? Apa manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat? Bila tidak ada benefit untuk masyarakat, pasti masyarakat tidak akan mau membantu.

Tanya Bapak Lugil (Kantor Sekda):

Kami memahami bahwa output kegiatan ini adalah informasi, jadi Pemda meminta agar bisa lebih dilibatkan dalam kegiatan ini. Pemda sudah sering menjadi korban akibat informasi kegiatan penelitain sebelumnya langsung dilaporkan ke pusat sehingga pemda merasa ditinggalkan. Jadi seringkali pemda dianggap sebagai pihak yang tidak pro masyarakat atau tidak sejalan karena tidak tahu ada informasi baru. Kerja sama dengan Pemda mungkin akan susah, karena proses birokrasi. Tapi itu bisa didiskusikan bersama dan bisa dicari jalan keluarnya.

Respon presenter Panel 4

Jawab Dr Yves Laumonier:

Sasaran proyek selama 4 tahun adalah untuk mendapatkan data yang lebih baik agar bisa digunakan untuk penyusunan tata guna lahan yang lebih baik

2.2. Kesimpulan Diskusi Panel

Pada akhir diskusi panel, Ibu Moira yang juga bertindak sebagai moderator menyampaikan beberapa poin rangkuman hasil diskusi antara lain :

- Kegiatan ini merupakan lokakarya awal, dimana semuanya masih berada di tahap awal. Setelah ini, proyek CoLUPSIA akan mulai beraktivitas dan diharapkan aktivitas-aktivitas ke depan mendapat dukungan pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu. Proyek CoLUPSIA terbuka dan tidak berkeberatan apabila diperlukan adanya sharing informasi dan data baik oleh pemerintah kabupaten atau stakeholder lainnya.
- Didalam diskusi hari ini masih ada kekhawatiran, bahwa konservasi merupakan penghambat pembangunan. Seharusnya tidaklah demikian, karena sebenarnya konservasi bisa dipakai untuk menunjang pembangunan. Untuk itu perlu adanya tata ruang atau tata guna lahan untuk mendudukkan dan negosiasi berbagai kepentingan para pihak demi mencapai kesepakatan antar pihak.
- Pemerintah sebaiknya berperan sebagai fasilitator, karena proses kesepakatan multi pihak harus melibatkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk menetapkan kerangka dasar, mengatur agar negosiasi berlangsung adil agar kewajiban sesuai hak dan kepentingan umum dilindungi, Monitoring dan pengawasan, pengelolaan arus komunikasi dan mengawal proses multi-pihak
- Proses multi pihak itu penting dilakukan karena para pihak tidak bisa hanya berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya kerjasama semua elemen : pemerintah, swasta, masyarakat untuk bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik.
- Kolaborasi bermakna bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk tujuan bersama yang ditetapkan bersama dan demi manfaat bersama. Manfaat tersebut tidak harus sama satu pihak dengan lainnya. Kolaborasi memerlukan kesiapan untuk bernegosiasi dan menghadapi konflik.

Sebagai penutup, Bapak Baco Maiwa sebagai perwakilan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diminta menyampaikan kata akhir sekaligus menutup acara diskusi panel. Dalam kata sambutannya beliau berterima kasih atas inisiatif yang digagas oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dan Proyek CoLUPSIA dan merasa terharu karena mereka yang peduli terhadap bumi Uncak Kapuas ini justru datang dari luar Kapuas Hulu. Beliau berharap apa yang dilakukan pada hari ini dapat menginspirasi kita, tokoh masyarakat maupun masyarakat luas agar bisa meninggalkan kenangan kepada anak cucu nanti tentang bagaimana memelihara bumi yang lebih baik.

2.3. Workshop Hari Kedua, 29 September 2010

Agenda kegiatan pada hari kedua adalah melakukan identifikasi dan analisis stakeholder atau pemangku kepentingan yang berperan di dalam menentukan proses perencanaan suatu tata guna lahan. Apa kepentingannya? Bagaimana peran, hak serta tanggung jawab stakeholder tersebut?. Keseluruhan kegiatan pada hari kedua ini dipandu oleh Ibu Moira Moeliono dari CIFOR.

Pertama-tama Ibu Moira menyampaikan uraian mengenai analisis stakeholder, manfaat dan kepentingannya. Setelah itu peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dimana untuk masing-masing kelompok akan dipandu dan difasilitasi oleh fasilitator dari Proyek CoLUPSIA. Pada bagian akhir kegiatan, hasil diskusi dan analisis dari kelompok akan dipresentasikan kepada seluruh peserta untuk mendapatkan masukan dan umpan balik.

2.3.1 Identifikasi dan Analisis Stakeholder oleh Ibu Moira Moeliono (CIFOR)

Dalam presentasinya, Ibu Moira pertama-tama menjelaskan mengenai definisi stakeholder (SH) yaitu orang, kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya/proses/jasa/intervensi atau yang dipengaruhi atau mempengaruhi sumber daya/proses/jasa/intervensi. Beliau mencontohkan didalam suatu kawasan, ada beberapa aktivitas seperti pemanfaatan hasil hutan, Daerah Aliran Sungai, wilayah adat, biofuel, ternak, pemukiman dll.

Ada berbagai pertanyaan yang bisa ditarik dari fenomena ini. Siapa mereka? Apa kepentingannya? Apa yang mendorong orang-orang itu ingin memiliki?. Latar belakang tersebut sangat penting dikaji didalam perencanaan penggunaan suatu lahan. Misalnya karena kepentingan untuk: migrasi, kebijakan pemerintah, modal asing, tekanan terhadap lahan, pembangunan wisata, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat adat, pola penguasaan lahan, desentralisasi, hubungan kekuasaan local, harga pasar dll.

Ketika melakukan Identifikasi stakeholders, penting diingat adalah siapa yg terlibat dan sejauh mana terlibat? Keterlibatan para pihak bisa dinilai dengan prinsip 4R, yaitu:

1. Rights – Hak – hak legal apa yang dimiliki SH untuk memanfaatkan SDA?
2. Responsibilities – Tanggung Jawab – Apakah tanggung jawab resmi maupun tidak resmi terhadap SDA?
3. Returns – Manfaat – Manfaat apa yang mereka peroleh dari SDA? (jasa maupun produk)?
4. Relationships – Hubungan atau Keterkaitan– bagaimana hubungan antar kelompok SH pada berbagai tingkat dan skala?

Jadi analisis stakeholder penting dilakukan untuk memfasilitasi proses multi-stakeholder process sehingga dapat diketahui siapa yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam proses, bagaimana tiap pihak seharusnya berpartisipasi, cara yang paling tepat untuk berpartisipasi, dan menilai kemampuan para pihak untuk berpartisipasi.

Dalam melakukan analisis berikut ini beberapa tahapan analisis yang perlu dilakukan yaitu:

- Identifikasi Stakeholder: siapa mereka?
- Apa kepentingan, peran, hak dan kewajiban?
- Identifikasi posisi: berapa besar kepentingan mereka?
- Identifikasi posisi: berapa besar pengaruh mereka?
- Analisis: kekuatan; hubungan dan keterkaitan; kemampuan; dampak kegiatan SH; penguasaan atas SDA; kerentanan dan tingkat pemberdayaan; peluang konflik dan kerjasama antar SH

2.3.2 Diskusi Kelompok Identifikasi dan Analisis Stakeholder

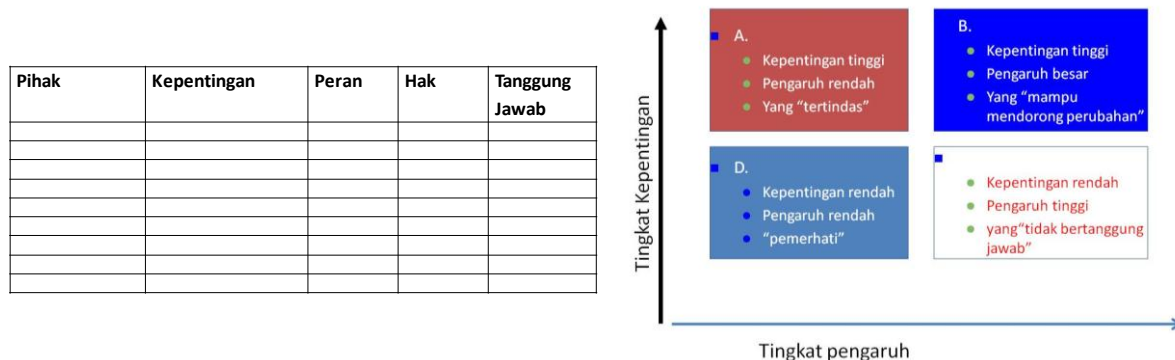
Setelah pemaparan materi, para peserta diajak untuk melakukan analisis stakeholder yang dipandu oleh fasilitator dari Proyek CoLUPSIA. Pada sesi ini, peserta dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang beranggotakan peserta yang mewakili keragaman stakeholder di Kabupaten Kapuas Hulu.

Gambar 5. Suasana Diskusi Kelompok



Untuk melakukan analisis stakeholder, masing-masing kelompok mendiskusikan siapa stakeholder dan peran mereka, kemudian hasil diskusi tersebut dirangkum menggunakan matrik analisis (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Matrik analisis stakeholder



2.3.3 Hasil Diskusi Kelompok

Setelah mendiskusikan analisis stakeholder, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam forum pleno. Beberapa kelompok hanya menyelesaikan satu matrik saja karena diskusi yang cukup alot dan panjang. Setiap peserta melihat peran stakeholder yang dianalisis secara berbeda sehingga untuk menemukan titik temu relatif sulit. Sementara itu kelompok lainnya lebih mudah mencapai kesepakatan.

Tabel 2. Matrik Stakeholder : Peran dan Tanggung Jawab (Kelompok 2)

Siapa	Kepentingan	Peran	Hak	Kewajiban
Masyarakat lokal/adat	- Hutan tidak rusak - Adanya kepastian akan mata pencarian (kepentingan ekonomi)	Menjaga hutan Memanfaatkan sesuai peruntukan	Memanfaatkan lahan secara berkelanjutan MASUKAN: (memiliki, mengelola)	Memanfaatkan dan menjaga lahan secara berkelanjutan
Masyarakat Luas/Kota	- Kepentingan ekonomi: ketergantungan dengan ekonomi masy lokal - Kepentingan lingkungan lestari			
Pemerintah Daerah	- PAD - Pembangunan - Keamanan - Birokrasi dan Regulasi	Regulasi monev	Penerimaan PAD	Mengendalikan, mengontrol dan mengawasi (monev)
Pemerintah Pusat	- PAD - Pembangunan - Keamanan - Birokrasi dan Regulasi - Konservasi	Regulasi Monev	Penerimaan PAD	Mengendalikan, mengontrol dan mengawasi (monev)
LSM	- Kontrol pelaksanaan kebijakan - Konservasi	Kontrol	Mendapatkan proyek	Memberi kontrol dan masukan yang baik
Lembaga internasional	Kontrol pelaksanaan kebijakan	- Kontrol - Memberi gagasan/ide	- Mengawasi implementasi kebijakan - Memberi masukan	Membangun kerjasama dengan pemerintah
Pengusaha	Kepastian usaha untuk mencapai keuntungan	Memanfaatkan dan menjaga lahan sesuai keputukannya	Mendapatkan hasil dari investasi	Menjalankan investasinya sesuai dengan ketentuan

Dalam presentasi kelompok tersebut, berkembang diskusi yang cukup menarik mengenai pengaruh masyarakat dalam tata guna lahan. Beberapa peserta menilai ‘masyarakat’ memiliki kepentingan yang tinggi namun pengaruhnya rendah. Sementara ‘LSM’ dinilai mempunyai kepentingan dan pengaruh yang rendah (Lihat Tabel 3).

Tabel 3. Matrik Stakeholder : Kepentingan dan Pengaruh (Kelompok 2)

A	B
Masyarakat	Pemerintah Daerah dan Pusat, Legistatif, Investor
C	D
Akademisi Lembaga internasional	LSM lokal, nasional dan internasional

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa peserta menilai stakeholder ‘masyarakat’ bisa berpindah dari gradien A ke B dimana kepentingan dan pengaruhnya besar. Selain itu, stakeholder ‘LSM’ juga dipersepsikan mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi (gradien B). Menengahi permasalahan ini, Ibu Moira menjelaskan bahwa pengaruh besar maupun kecil perlu dilihat pengaruhnya terhadap apa?.

Kadang-kadang stakeholder berpengaruh terhadap suatu hal namun pada konteks yang berbeda mereka tidak punya pengaruh sama sekali. Tentunya pengaruh dan kepentingan tersebut harus diletakkan konteks terhadap tata guna lahan di kabupaten Kapuas Hulu.



Gambar 6. Presentasi Kelompok

Melalui sesi analisis ini, peserta belajar untuk menganalisis siapa para pihak berkepentingan, apa peran dan tanggung jawab mereka serta pengaruhnya terhadap isu yang sedang dibahas. Beberapa catatan yang menjadi pembelajaran dari sesi diskusi analisis stakeholder ini adalah:

- Menentukan stakeholder tidak cukup apabila dilakukan dalam satu jam saja. Apa yang dicapai pada sesi ini baru mengenai kepastian lahan sebagai prasyarat mendasar dalam tata guna lahan.

- Tata guna lahan merupakan suatu perangkat untuk mencari keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapat penghidupan yang layak tanpa menimbulkan konflik. Dengan adanya tata guna lahan dapat ditentukan alokasi paling rasional dari pihak-pihak yang terlibat.
- Terkait dengan akuntabilitas, siapapun berhak menyampaikan masukan kepada pemerintah termasuk LSM sepanjang masuk akal dan ilmiah. Demikian pula pemerintah melalui instansi dibawahnya perlu memperhatikan agar tidak ada hak warga negara yang dilanggar. Dari interaksi yang nantinya dibangun proyek ini, hasil yang akan diimplementasikan juga merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang antara pemerintah dan warga negara sebab masing-masing ada porsinya. Demikian pula konservasi jangan dipahami secara sempit sebagai anti pembangunan. Justru konservasi harus dimaknai sebagai proses yang sejalan dengan pembangunan.

3 KESIMPULAN DAN PENUTUP

Secara umum diskusi panel berjalan dengan baik, seluruh agenda kegiatan berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Peserta sangat antusias mengikuti diskusi ini, terlihat dari jumlah peserta yang hadir pada hari pertama tercatat sebanyak 53 orang dan pada hari kedua sebanyak 44 orang.

Materi panelis yang disajikan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta dalam bentuk pertanyaan, komentar maupun saran, dan ini membuat dinamika tersendiri dalam acara ini. Pertanyaan dan komentar yang disampaikan membantu Proyek CoLUPSIA untuk memahami permasalahan terkait tata guna lahan di Kabupaten Kapuas Hulu serta menjadi input yang positif untuk perencanaan kegiatan proyek ke depan.

Peserta undangan datang dari berbagai kalangan dan mewakili keragaman stakeholder di Kapuas Hulu. Melalui forum ini, para pihak terlihat mulai saling berkomunikasi yang merupakan langkah awal untuk membangun gagasan mengenai tata guna lahan secara kolaboratif di Kapuas Hulu.

Secara umum masih terdapat kekhawatiran, bahwa konservasi merupakan penghambat pembangunan. Seharusnya tidaklah demikian, karena sebenarnya konservasi bisa dipakai untuk menunjang pembangunan. Untuk itu perlu adanya tata ruang atau tata guna lahan untuk mendudukkan persoalan dan negosiasi berbagai kepentingan para pihak demi mencapai kesepakatan antar pihak.

Mengingat presentasi proyek ini masih dalam tahap awal, peserta masih menyimpan banyak pertanyaan terutama hasil akhir yang nantinya akan dicapai oleh proyek ini. Namun demikian, jawaban yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami karena proses yang berkaitan dengan tata ruang umumnya diketahui oleh instansi terkait saja. Menjawab hal ini, proyek CoLUPSIA akan terbuka dan dengan senang hati berbagi informasi dan data apabila diperlukan untuk bahan perencanaan di Kabupaten.

Harapan yang muncul dari hasil diskusi panel ini bahwa kegiatan proyek dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, sebagai tindak lanjut dan implementasi ke depan, hasil yang sudah ada tidak ditinggal begitu saja dan perlu adanya pengembangan kapasitas khususnya bagi pemda Kapuas Hulu. Perasaan memiliki terhadap hasil kegiatan proyek perlu ditumbuhkan agar kesinambungan peran dan tanggung jawab tetap terjaga.

Pembagian peran dan kerjasama antar pihak harus dilakukan, misalnya NGO dapat memberikan masukan tentang bagaimana menyusun tata guna lahan secara kolaboratif. Pemerintah sebaiknya berperan sebagai fasilitator, karena proses kesepakatan multi pihak harus melibatkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk menetapkan kerangka dasar, mengatur agar negosiasi berlangsung adil agar kewajiban sesuai hak dan

kepentingan umum dilindungi, Monitoring dan pengawasan, pengelolaan arus komunikasi dan mengawal proses multi-pihak

Akhirnya, melalui kegiatan diskusi panel ini, para pihak mengetahui keberadaan proyek CoLUPSIA dan melalui komunikasi yang lebih intens antar para pihak selama proyek ini berlangsung diharapkan mendorong terwujudnya tata guna lahan kolaboratif yang memperkuat kelembagaan dan hak-hak masyarakat.

Penutup

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung terselenggaranya acara ini, Bappeda yang secara intens mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini, ucapan terima kasih pula disampaikan kepada para pihak yang hadir dan aktif memberikan masukan dalam diskusi panel ini serta saran yang konstruktif bagi pelaksanaan kegiatan proyek CoLUPSIA di Kabupaten Kapuas Hulu.